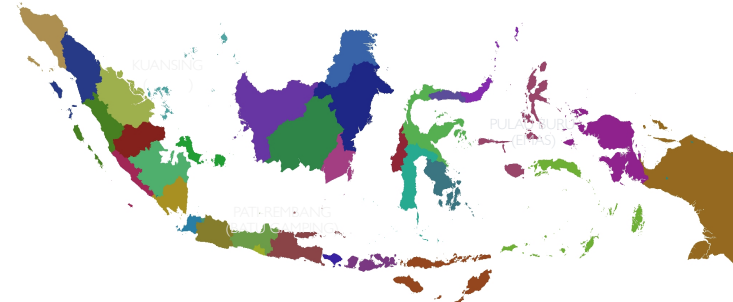




KERANGKA KEBIJAKAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA (KEGIATAN PERTAMBANGAN)

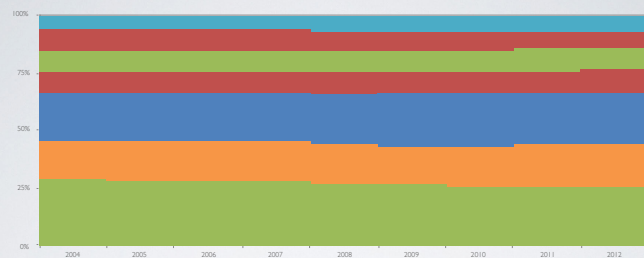
M.R. KARLIANSYAH
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAHAN RUSAK YANG HARUS DIPULIHKAN



1. Data APRI: ada sekitar **4000 lokasi bekas tambang** (lebih 40% di kawasan hutan)
2. Perlu segera pemulihan fisik (Reklamasi)
3. Perlu pemulihan lahan dari kontaminan (**13.000 ton Hg/tahun**)
4. Perlu juga penyuburan lahan karena tanah humus sdh hilang

PERAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA



Pertambangan masih memberikan sumbangan penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto Atas dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha yang diolah dari Pusat Biro Statistik sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB nasional berkisar antara 7,5% - 9,1 % antara tahun 2004 sampai dengan 2012

Sumbangan sektor ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 sektor ini memberikan sumbangan 9,1 % terhadap Produk Domestik Bruto Nasional, tetapi mengalami kontraksi menjadi 7,1 % pada tahun 2012.

TREND EKSPLOITASI BESAR-BESARAN

Tahun	Konsentrat Tin (tonmetrik)	Batu Bara (ton)	Nikel (ton)	Biji Besi (ton)	Konsentrat Tembaga (tonmetrik)
1996	52.304	50.332.047	3.426.867	425.101	1.758.910
1997	54.521	55.982.040	2.829.936	516.403	1.817.880
1998	53.960	58.504.660	2.736.640	509.978	2.640.040
1999	49.708	62.108.239	2.798.449	502.198	2.645.180
2000	56.360	67.105.675	2.434.585	420.418	3.270.335
2001	69.494	71.072.961	2.473.825	440.648	2.418.110
2002	88.142	105.539.301	2.120.582	190.946	2.851.190
2003	74.316	113.525.813	2.499.728	245.911	3.238.306
2004	73.080	128.479.707	2.105.957	79.635	2.812.664
2005	78.404	149.665.233	3.790.896	87.940	3.553.808
2006	79.100	162.294.657	3.869.883	84.954	817.796
2007	64.127	188.663.068	7.112.870	84.371	796.899
2008	79.210	178.930.188	6.571.764	4.455.259	655.046
2009	56.602	228.806.887	5.819.565	4.561.059	973.347
2010	97.796	325.325.793	9.475.362	na	993.152

Penurunan peran pertambangan terhadap perekonomian nasional ini ternyata tidak berkorelasi dengan kecenderungan eksploitasi secara besar-besaran kegiatan pertambangan sejak tahun 2001 untuk Timah, Batubara, Nikel dan Biji Besi

Anomali justru terjadi pada komoditas konsentrat tembaga yang terus mengalami kecenderungan penurunan produksi sejak tahun 2006.

POTENSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN

AIR & UDARA

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Penanganan dengan **Baku Mutu Lingkungan**

LAHAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku kerusakan lingkungan belum ada, shg **RTRW dan AMDAL** menjadi penting

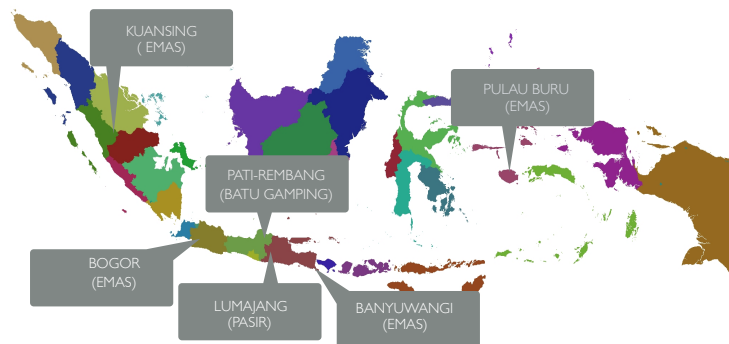
Jenis Dampak	Persen Kejadian
Pencemaran Air Permukaan	70
Pencemaran Air Tanah	65
Kerusakan Lahan	50
Kesehatan Manusia	35
Kerusakan Flora dan Fauna	25
Pencemaran Udara	20
Sumber : US EPA, (1995)	

KERUSAKAN LAHAN

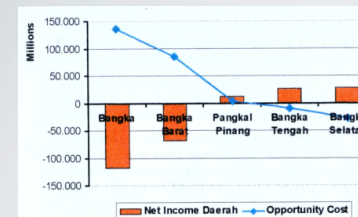
No	Provinsi	2005 (ha)	2010 (ha)	Peningkatan (%)
1	Kalimantan Timur (terutama Kutai Barat)	223.354	272.076	22
2	Kalimantan Selatan	41.703	62.522	50

BENCANA BANJIR di Kalimantan Selatan meningkat menjadi 17 kali dalam tahun 2004 dan **42 kali dalam tahun 2010**

KONFLIK SOSIAL

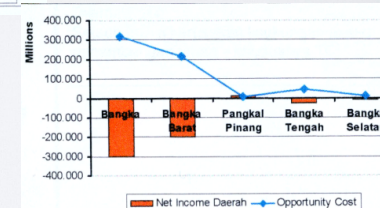


DAMPAK EKONOMI



- Hasil Studi KLH – IPB (2005) terhadap TI timah di Bangka menunjukkan bahwa TI tidak memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah secara makro.
- Kegiatan PETI, tanpa diperhitungkan biaya rehabilitasi & reklamasi, hanya menyebabkan surplus di 3 kabupaten di P. Bangka; 2 kab. yang lain mengalami defisit.

Jika biaya rehabilitasi & reklamasi diperhitungkan, semua kabupaten di Pulau Bangka mengalami defisit.



EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN TAHUN 2013 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Parameter Valuasi Ekonomi

- | | |
|---|--|
| 1. Pajak Perusahaan | 8. Biaya Kesehatan Masyarakat |
| 2. Penyerapan Tenaga Kerja | 9. Biaya Penanggulangan Penurunan |
| 3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat | Produktivitas Pertanian |
| 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat | 10. Biaya Memenuhi Kebutuhan Air |
| 5. Tingkat Pajak Property Masyarakat | 11. Biaya Penanggulangan Pencemaran |
| 6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal | 12. Biaya Revegetasi |
| 7. Pengembangan Sarana Infrastruktur Wilayah | 13. Biaya Pemeliharaan Prasarana Umum |
| | 14. Biaya Konflik sosial |

Hasil Valuasi Ekonomi

No	Kabupaten Tambang	NPV_Operasional	NPV_Natural Capital	Nilai Manfaat	NPV_Manfaat (NPV OP – NPV NC)
1	Bangka Barat	12.102.457.903.347	348.155.236.596.176	-336.052.778.692.829.00	<
2	Belitung Timur	(5.231.313.490.006)	56.181.302.813.870	-61.412.616.303.876.00	<
3	Bogor	9.768.912.143.807	774.198.441.721	4.994.713.704.086.00	>
4	Kanowe Utara	13.515.465.535.837	4.222.213.186.950.670	-4.208.697.721.414.830.00	<
5	Morowali	16.170.165.582.477	261.545.397.214.328	-245.375.231.631.851.00	<
6	Tanah Bumbu	1.911.122.383.067	508.625.428.294.042	-506.714.305.910.975.00	<
7	Tanah Laut	(41.455.750.477.313)	503.816.769.624.241	-545.272.520.101.554.00	<
8	Kutai Kartanegara	408.759.195.211.725	990.198.884.578.721	-581.439.689.366.996.00	<
9	Kutai Timur	(39.722.866.342.932)	4.829.731.835.634.110	-4.869.484.401.977.040.00	<

Skenario Alternatif Pengambilan Keputusan

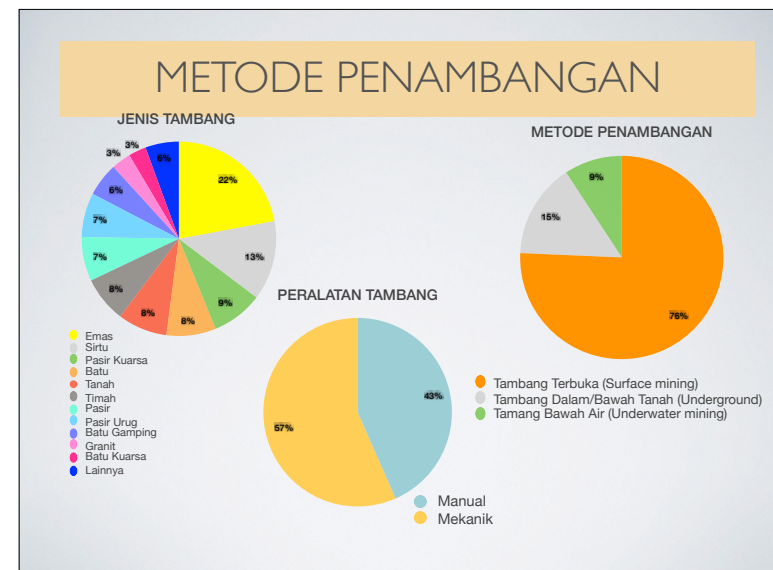
- Berlanjut atau menerima usaha pertambangan; nilai manfaat > 0 (nol)
- Membekukan sementara usaha pertambangan; nilai manfaat = 0 (nol), TR=TC dalam bentuk PV
- Tidak Berlanjut atau menolak usaha pertambangan; nilai manfaat < 0 (nol)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

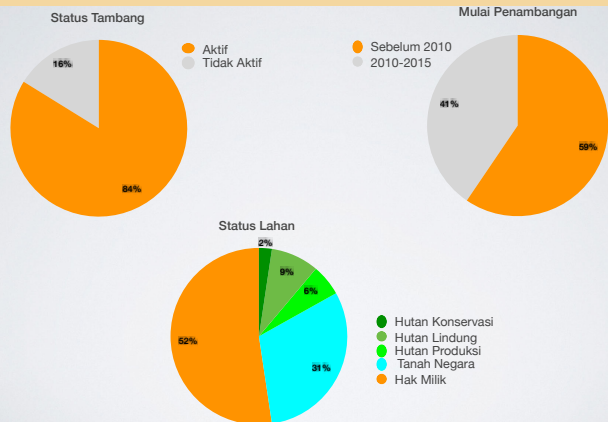
- Memperkuat kehadiran Negara (Nawacita ke-4):
 - Melakukan reformasi sistem
 - Melakukan penegakan hukum
- Sasaran:
 - Meningkatnya *good mining practices*
 - Berkurangnya kegiatan PETI yang tidak bertanggung jawab
- Arah kebijakan:
 - Standar *good mining practices*
 - Pembinaan dan pendampingan
 - Bantuan teknologi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

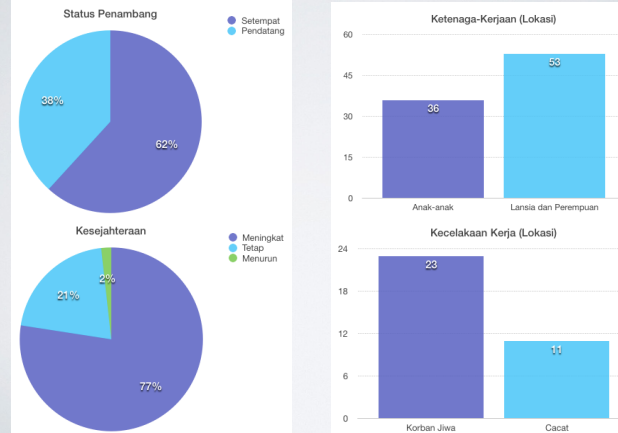
- Kemandirian Ekonomi (Nawacita ke-7):
 - Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
- Sasaran:
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - Meningkatnya role model sikap dan perilaku masyarakat peduli alam dan lingkungan
- Arah kebijakan:
 - Penguatan sistem pemantauan kualitas LH
 - Peningkatan kualitas LH (air, udara, tutupan lahan/hutan)
 - Penguatan instrumen
 - Penegakan hukum lingkungan



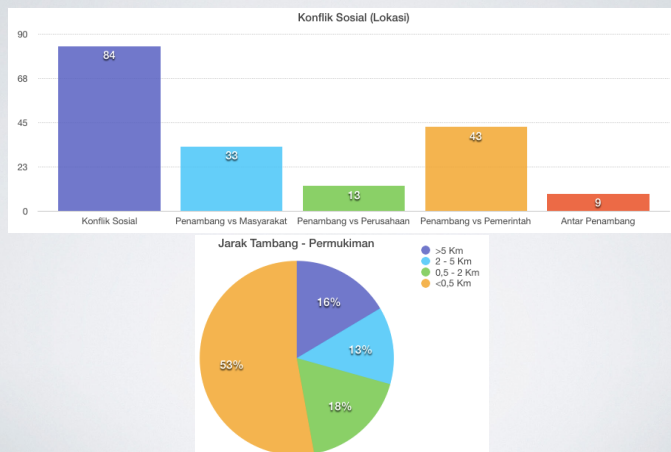
STATUS TAMBANG DAN LAHAN



ASPEK SOSIAL



KONFLIK SOSIAL



RENCANA AKSI NASIONAL

HASIL ANALISIS BASIS DATA

Rencana Aksi Nasional
Pemulihan Lahan Akses Terbuka Akibat
Pertambangan

1. Penyiapan NSPK
2. Tata Kelola
3. Rencana Pemulihan sudah harus dirancang sejak perizinan
4. Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah

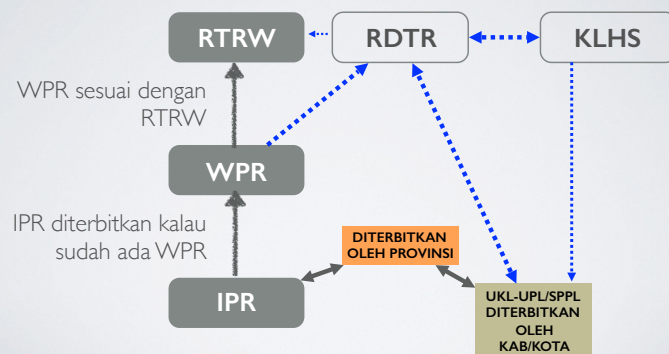
PELAKSANAAN PENGENDALIAN



PENGAWASAN PEMERINTAH

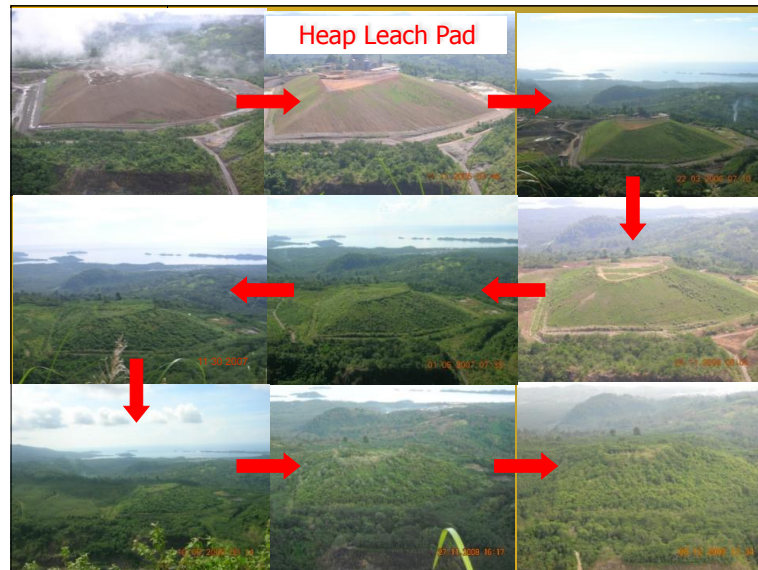
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (PASAL 71 AYAT 1 UU 32/2009)

PENGUATAN ASPEK PERIZINAN



MENINJAU ULANG KONSEP PENUTUPAN TAMBANG





Tata Ruang Untuk Urban Area



- Tergantung kepada lokasinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan (kota), lahan bekas pertambangan dapat digunakan sebagai lokasi untuk perumahan dan pusat-pusat rekreasi, pusat penelitian dan pendidikan.
- Untuk konstruksi bangunan perumahan tantangannya adalah melakukan backfilling lubang-lubang tambang dan mengelola lumpur-lumpur yang ada di dasar kolam.
- Biaya yang paling murah untuk mengelola lumpur adalah dengan mencampur dengan kapur.
- Pendekatan teknik sipil yang lain untuk mengkonsolidasi struktur tanah seperti preloading, geotextile dan wick drains juga dapat dilakukan.
- Catatan penting, beberapa pembangunan pusat rekreasi yang meng copy konsep Sunway dalam skala yang lebih kecil tidak berjalan dengan baik .

Tata Ruang Untuk Daerah Pedesaan

- Untuk daerah pedesaan lebih diarahkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.



TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan